

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1992.
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Budi Santoso, *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operate Transfer)*, Geta Press, Solo, 2008.
- Hadi Soetrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.
- Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1982.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*. PP No. 6 Tahun 2006.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah*. PP No. 38 Tahun 2008.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*. PP No. 27 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Kudus. *Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah*. PERDA No. 12 Tahun 2012.

Pemerintah Kabupaten Kudus. *Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar*. PERDA No. 14 Tahun 2012.

Departemen Dalam Negri. *Peraturan Menteri Dalam Negri tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik negara*. PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007.

Indonesia. *Keputusan Presiden tentang tim penertiban barang milik negara*. KEPRES No. 17 Tahun 2007.